



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHAMAD ABDUL AZIS
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 476217

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1240 m2/140 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/180 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 206.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 311.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 15.780.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 129.700.000

Sub Total Rp. 2.512.480.000



III. HUTANG

Rp. 455.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.057.480.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.